

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.

Secara umum *community development* adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memberi akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya (Rudito, 2003).

Menurut Tonny (2001), prinsip-prinsip pengembangan masyarakat adalah sebagai berikut : Pembangunan terpadu, konfrontasi dengan kebatilan struktural, hak azazi manusia, keberlanjutan, pemberdayaan, pribadi dan politik, kepemilikan komunitas, kemandirian, ketidaktergantungan pada pemerintah, tujuan dan visi., pembangunan bersifat organik, kecepatan gerak pembangunan, keahlian pihak luar, membangun komunitas, proses dan hasilnya, keterpaduan proses, tanpa kekerasan, inklusif, konsensus, kerjasama, partisipasi, mendefinisikan kebutuhan.

Menurut Budimanta (2003) secara umum ruang lingkup program-program pemberdayaan masyarakat dapat dibagi berdasarkan kategori sebagai berikut :

1. *Community services*, merupakan pelayanan koorporat untuk melayani kepentingan masyarakat ataupun kepentingan umum.
2. *Community empowering* adalah program-program yang berkaitan dengan akses yang lebih luas kepada masyarakat untu menunjang kemandiriannya.
3. *Community relation* yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada pihak yang terkait. Seperti konsultasi publik dan penyuluhan.

Dari sekian banyak tahapan pemberdayaan masyarakat, kita akan mengambil beberapa model yang cukup populer seperti : mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan dan potensinya, mengembangkan rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian, menerapkan rencana tersebut serta terus-menerus memantau dan mengkaji proses dan hasil kegiatan (Monitoring dan Evaluasi/M&E). Kemudian temuan-temuan monitoring dan evaluasi dikaji (kembali ketahap (a). Kemudian rencana perlu disesuaikan atau, kalau tujuan telah tercapai, akan disusun rencana pengembangan baru (tahap(b)). Pelaksanaan tahap-tahap diatas sering jalan bersamaan akan lebih bersifat proses yang diulangi terus-menerus. Kerap kali dilakukan melalui pendekatan kelompok dimana anggota bekerjasama dan berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Untuk pengembangan kelompok ada kegiatan-kegiatan khusus yang sedang dilaksanakan dan juga kegiatan lainnya (Sudiana, 2007).

2. Konsepsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan kedalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan dapat dipercaya. Meningkatnya kapasitas pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).

3. Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
4. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menaggulangi kemiskinan di wilayahnya.
5. Meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
6. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Menurut Royat (2007) *dalam* Mediyanto Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. **PNPM-inti:** terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan yang mencakup PPK, P2KP, P2DTK dan PISEW.
- b. **PNPM-Penguatan:** terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu. Pelaksanaan program-program ini di tingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri.

Komponen umum PNPM Mandiri adalah : (1) pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat untuk menuju kemandirian melalui pemetaan potensi, masalah, dan kebutuhan, perencanaan

partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai, (2) bantuan langsung masyarakat (BLM) yang bertujuan untuk dana stimulan keswadayaan untuk membiayai sebagian kegiatan, terutama untuk masyarakat miskin, (3) peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal yang bertujuan untuk mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi positif bagi masyarakat (terutama kelompok miskin) dalam menyelenggarakan kehidupan yang layak, (4) bantuan pengelolaan dan pengembangan program yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya program secara tepat dan akuntabel dan memungkinkan kelompok peduli untuk terlibat langsung (seperti pengendalian mutu dan evaluasi program).

Menurut Rahayu (2007) *dalam* Mediyanto ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi:

1. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya;
2. Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini;
3. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs (Millenium Development Goals) atau pencapaian tujuan pembangunan milenium;

4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

Kegiatan yang dapat didanai melalui PNPM Mandiri mencakup perencanaan kerja masyarakat yang meliputi : (1) penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya, (2) penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini, (3) kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs.(4) peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi keuangan, dan penerapan tata pemerintahan yang baik.

Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri terdiri dari persiapan, perencanaan partisipatif, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan sosialisasi.

1. Persiapan

Persiapan pelaksanaan PNPM Mandiri di pusat dikoordinasikan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri yang meliputi antara lain kebijakan umum dan pengembangan program, penetapan lokasi, strategi komunikasi, pengembangan sistem informasi, serta monitoring dan evaluasi. Persiapan pelaksanaan PNPM Mandiri di daerah dikordinasi oleh Tim Koordinasi provinsi dan kabupaten/kota, yang meliputi antara lain menyediakan kontribusi dana yang berasal dari anggaran

daerah, membentuk Sekretariat Tim Koordinasi PNPM Mandiri, serta membentuk Tim Satuan Kerja Pelaksanaan Program.

2. Perencanaan Partisipatif

Perencanaan Partisipatif adalah proses pengambilan keputusan pembangunan yang melibatkan masyarakat, swasta, dan pemerintah sesuai fungsinya masing-masing. Mekanisme perencanaan partisipatif terdiri atas perencanaan di desa/kelurahan, antar desa/kelurahan (kecamatan), serta perencanaan koordinatif di kabupaten/kota.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri dilakukan oleh masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan difasilitasi oleh perangkat pemerintahan yang dibantu oleh fasilitator atau konsultan. Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah proses perencanaan selesai dan ada keputusan tentang pengalokasian dana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan meliputi pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan, pencairan atau pengajuan dana, pengerahan tenaga kerja, pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Personil tim pengelola kegiatan yang dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat, bertanggung jawab dalam realisasi fisik, keuangan, serta administrasi kegiatan yang dilakukan secara rencana.

4. Pengendalian

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pemantauan, pengawasan, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan

bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan program. Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantifikasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul.

5. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan persoalan dan pertanyaan dari masyarakat, pelaku program, pemerintah, kelompok peduli, dan lainnya terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip pengelolaan pengaduan masyarakat adalah berjenjang yaitu penanganan pengaduan mulai pada tingkat yang terdekat dengan lokasi pengaduan, agar penanganan dilakukan sesegera dan sedekat mungkin dari lokasi.

6. Evaluasi

Evaluasi program bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan, manfaat, dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka PNPM Mandiri terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala, baik oleh pengelola program maupun pihak independen seperti antara lain LSM, perguruan tinggi, lembaga peneliti, dan sebagainya.

7. Pelaporan

Pelaporan PNPM Mandiri dilaksanakan secara berkala dan berjenjang melalui jalur struktural (perangkat pemerintah) dan jalur fungsional (konsultan dan Fasilitator) guna menjamin aliran informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada setiap pemangku kepentingan. Yang dimaksud berkala adalah setiap periode waktu

tertentu, sedangkan berjenjang adalah dari satu unit kerja tingkat masyarakat sampai tingkat Tim Pengendalian PNPM Mandiri.

8. Sosialisasi

Sosialisasi PNPM Mandiri bertujuan untuk memberi pemahaman kepada perangkat pemerintahan, baik pihak eksekutif maupun legislatif, perguruan tinggi, organisasi, dan lembaga swadaya masyarakat, masyarakat pengusaha, media massa, serta masyarakat umum lainnya. Hal-hal yang disampaikan meliputi kebijakan, pengertian, tujuan, konsep, mekanisme, dan hasil-hasil pelaksanaan PNPM Mandiri agar terbangun pemahaman, kepedulian, serta dukungan terhadap PNPM Mandiri.

Di Desa Muara Penimbung Ulu sendiri kegiatan yang dilakukan oleh PNPM Mandiri hanya terdiri dari empat kegiatan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan dan pengawasan. Untuk kegiatan perencanaan dilakukan oleh pengelola PNPM Mandiri dengan melibatkan anggota masyarakat yang menerima bantuan untuk menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan. Untuk kegiatan pengorganisasian merupakan kegiatan untuk mencari anggota baru yang akan menerima bantuan program serta keterlibatan anggota yang telah menerima bantuan dalam kepengurusan PNPM Mandiri. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan semula dengan melibatkan anggota penerima bantuan. Pengawasan dilakukan terhadap keberhasilan dari program yang telah dilaksanakan dan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan terhadap bantuan yang telah diberikan. Kegiatan ini dilakukan oleh pengurus PNPM Mandiri dan anggota penerima bantuan program.

3. Konsepsi Biaya Produksi

Menurut Husin dan Lifianthi (2009), biaya produksi merupakan jumlah kompensasi yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi. Sedangkan Sukirno (2002), mengatakan bahwa biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang.

Menurut Rosyidi (1982), biaya produksi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TC = FC + VC$$

Dimana :

$$TC = \text{Biaya total (Rp/mt)}$$

$$FC = \text{Biaya tetap (Rp/mt)}$$

$$VC = \text{Biaya Variabel (Rp/mt)}$$

Menurut Hernando (1996), biaya produksi sangat penting untuk diklasifikasikan, karena dapat diketahui kebenaran jumlah biaya yang tertera pada pernyataan pendapatan (*income statement*). Dia juga menyatakan bahwa ada empat kategori atau pengelompokan biaya, yaitu :

1. Biaya Tetap (*fixed cost*).
2. Biaya variabel atau biaya-biaya perubahan (*variable cost*).
3. Biaya tidak tunai (diperhitungkan).
4. Biaya tunai.

4. Konsepsi Penerimaan dan Pendapatan

Penerimaan usahatani adalah nilai uang yang diterima petani dari penjualan produk usahatannya, yang meliputi jumlah pendapatan, nilai penjualan, produk dan nilai penggunaan rumah dan nilai yang dikonsumsi (Soekartawi, 1993). Penerimaan secara umum diartikan sebagai perkalian antara jumlah dari hasil produksi riil per tahun per satuan waktu dan luas dikalikan dengan harga per satuan produksi tersebut. Persamaan matematisnya adalah sebagai berikut:

$$P_n = Y \cdot H_y$$

Dimana:

P_n = penerimaan (Rupiah)

Y = produksi yang dihasilkan (Kg)

H_y = harga produksi (Rupiah)

Soekartawi (2002), mengemukakan bahwa penerimaan usaha tani dapat berbentuk tiga hal, yaitu :

1. Hasil penjualan tanaman, ternak, ikan atau produk yang akan dijual.
2. Produk yang akan dikonsumsi pengusaha dan keluarga selama melakukan kegiatan.
3. Kenaikan nilai inventaris, bahwa nilai benda-benda inventaris yang dimiliki petani berubah-ubah setiap tahun sehingga ada perbedaan nilai pada awal tahun dengan nilai pada akhir perhitungan. Jika terjadi kenaikan nilai benda-benda inventaris, maka selisih nilai akhir tahun dengan awal tahun merupakan penerimaan usahatani.

Pendapatan usahatani ialah selisih antara biaya yang dikeluarkan dengan penerimaan yang diperoleh dari kegiatan usahatani. Pendapatan bersih usahatani ialah selisih antara penerimaan dengan pengeluaran total usahatani. Pendapatan bersih usahatani mengukur imbalan yang diperoleh dari penggunaan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal dan pengelolaan (Tohir, 1991).

Menurut Pendapatan yang dikemukakan oleh Soekartawi (1993), besar kecilnya keuntungan yang diperoleh petani akan dipengaruhi tingkat penerimaan dan biaya produksi yang digambarkan oleh harga input, harga output, dan teknologi yang digunakan. Faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani adalah luas usaha yang meliputi luas areal pertanaman, selain itu juga dipengaruhi oleh tingkat produksi yang ditentukan oleh produktivitas per hektar per indeks pertanaman, serta pilihan dan kombinasi cabang usaha. Pendapatan bersih usahatani merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya total yang dikeluarkan dalam usahatannya. Persamaan matematisnya adalah sebagai berikut:

$$Pd = Pn - BP$$

Dimana:

Pd = pendapatan (Rupiah)

Pn = penerimaan (Rupiah)

BP = biaya produksi (Rupiah)

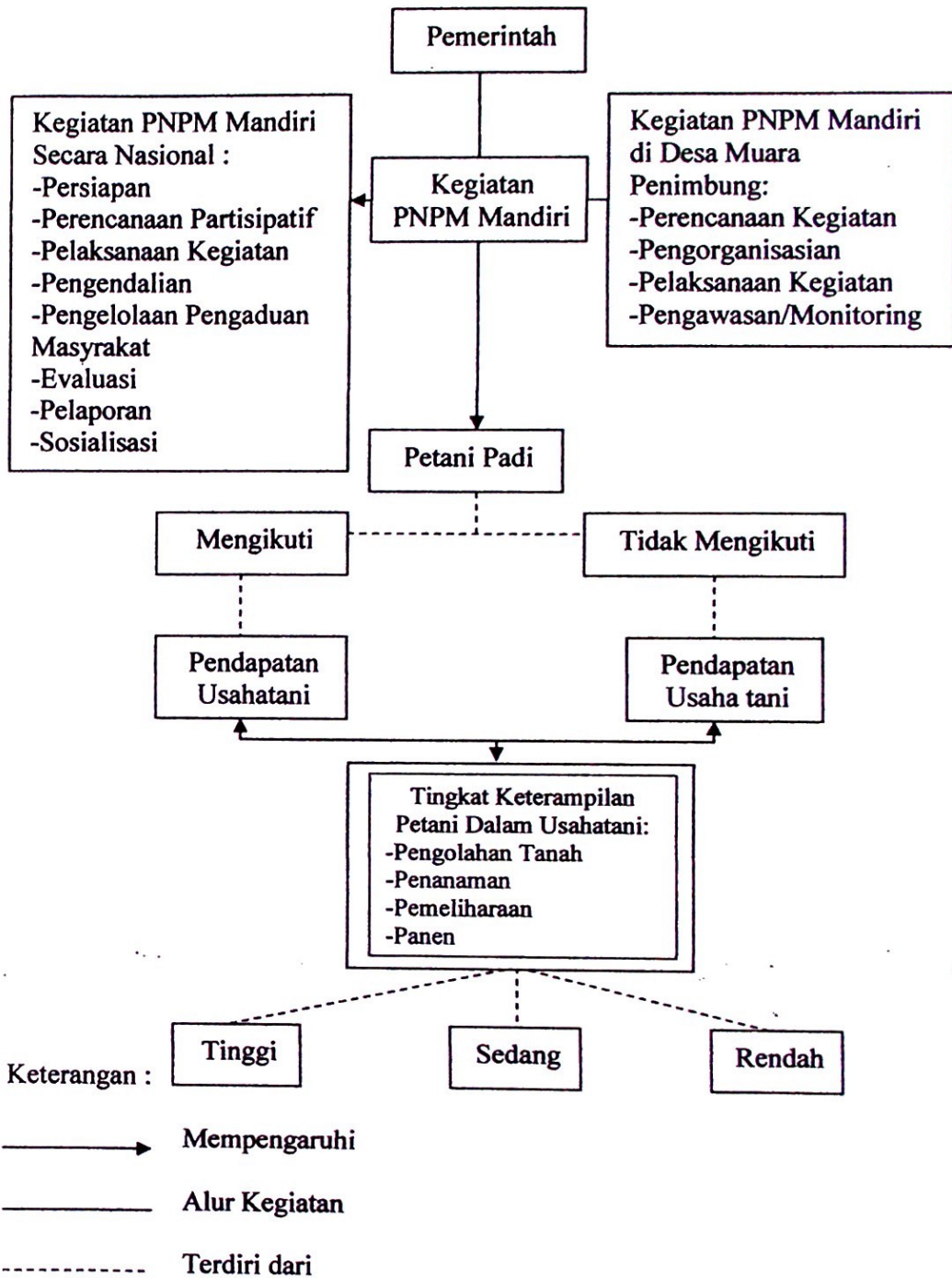
Menurut Asmani (1994), pendapatan petani dapat meningkat apabila didukung oleh harga produk pertanian yang layak. Kenaikan pendapatan para petani dalam jangka pendek lebih banyak digunakan untuk keperluan konsumsi barang-

barang tetapi dengan adanya kenaikan pendapatan ini perlu juga dipersiapkan sarana produksi pertanian. Petani sebaiknya menyisihkan uangnya untuk investasi.

Berdasarkan pendapat Daniel (2002), salah satu gejala dari permasalahan usahatani adalah pendapatan yang rendah. Salah satu ukurannya adalah pendapatan masing-masing sektor yang sebanding dengan banyaknya penduduk yang bekerja. Besarnya pendapatan usahatani ini juga disebabkan karena adanya perbedaan dalam struktur sumberdaya lainnya, seperti pupuk, pakan ternak bermutu, pestisida, mesin atau alat pertanian, dan penggunaan tenaga kerja. Pendapatan diluar usahatani juga memegang peranan penting terutama bagi petani kecil

B. Model Pendekatan

Model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan diagramatik, sebagai berikut :



Gambar 1. Model pendekatan secara diagramatis.

C. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang ada dan kerangka teoritis yang telah dipaparkan dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga tingkat keterampilan petani dalam berusahatani padi yang mengikuti lebih baik dari pada yang tidak mengikuti kegiatan PNPM Mandiri .
2. Diduga tingkat pendapatan petani padi yang mengikuti program PNPM Mandiri lebih baik dari pada petani yang tidak mengikuti kegiatan PNPM Mandiri.

D. Batasan-batasan

Batasan-batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Muara Penimbang Kabupaten Ogan Ilir.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional untuk menanggulangi kemiskinan yang berbasis masyarakat di Desa Muara Penimbang Kabupaten Ogan Ilir.
3. Tahapan PNPM Mandiri di Muara Penimbang meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan Pengawasan/monitoring.
4. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan pembangunan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah yang terdiri dari frekuensi hadir anggota dalam rapat dengan pengelola, keaktifan anggota dalam memberikan saran dan usulan serta keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan.
5. Pengorganisasian adalah keterlibatan anggota dalam mengorganisasikan semua kegiatan mulai dari mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan terlibat dalam pengukuhan lembaga pengelola.

6. Pelaksanaan kegiatan adalah kegiatan PNPM Mandiri yang dilakukan oleh masyarakat secara swakelola dan di fasilitasi oleh pemerintah serta dibantu oleh fasilitator yang terdiri dari keikutsertaan anggota dalam menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan, keterlibatan anggota dalam pengadaan barang/jasa bantuan program dan apakah bantuan tersebut dimanfaatkan oleh anggota dengan baik.
7. Pengawasan/monitoring adalah serangkaian kegiatan pemantauan dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang terdiri intensitas anggota dalam melakukan pengawasan dan penilaian terhadap ada tidaknya penyimpangan-penyimpangan.
8. Cara pengolahan tanah adalah kegiatan yang terdiri dari pembersihan lahan, pengolahan tanah dengan handtraktor dan penggemburan.
9. Penanaman adalah kegiatan yang terdiri dari penentuan umur bibit setelah penyemaian, pengaturan jarak tanam dan jumlah bibit yang ditanam dalam setiap lubang tanam.
10. Pemeliharaan adalah kegiatan yang terdiri dari intensitas penyiangan gulma, pemakaian dosis pupuk dan pemakaian pestisida untuk pengendalian HPT.
11. Panen adalah kegiatan yang terdiri dari penentuan umur panen, cara melakukan pemanenan dan penentuan ciri-ciri padi yang siap dipanen.
12. Masyarakat yang dijadikan contoh adalah masyarakat Desa Muara Penimbang Kabupaten Ogan Ilir.
13. Masyarakat yang mengikuti kegiatan PNPM Mandiri adalah masyarakat yang menerima bantuan program dari PNPM Mandiri di Desa Muara Penimbang Kabupaten Ogan Ilir.

14. Masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan PNPM Mandiri adalah masyarakat yang tidak menerima bantuan program dari PNPM Mandiri di Desa Muara Penimbung Kabupaten Ogan Ilir.
15. Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh petani padi dalam mengelola usahatani yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel (Rp/MT).
16. Penerimaan usahatani padi diperoleh dari produksi dikali harga jual padi (Rp/MT).
17. Produksi usahatani adalah hasil yang diterima dari usahatani yang berupa padi (Kg/MT).
18. Pendapatan usahatani padi adalah pendapatan yang berasal dari semua kegiatan usahatani padi (Rp/MT).
19. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data satu tahun yaitu tahun 2008.